



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

---

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus  
Telp. (0291) 438713  
E-mail : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 dilakukan dengan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang disertai dengan proses koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang lain.

Diharapkan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021, dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Kudus.

Kudus, Oktober 2021

Plt. KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sekretaris



**DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

## **DAFTAR ISI**

	Hal
Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum .....	2
1.4 Sistematika .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II .....	5
2.2 Faktor-faktor Penyebab Capaian Kinerja Rendah .....	14
2.3 Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kinerja .....	14
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERUBAHAN DAERAH .....	16
BAB IV PENUTUP .....	27

## **DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 2.1	Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah .....
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Renja Tahun 2021 .....
Tabel 3.2	Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja OPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 adalah :

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta program kegiatan yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2020.
- b. Sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD.

## **1.3. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 31).
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika**

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD hingga triwulan II Tahun 2021.

Bab III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA

Bab ini memuat usulan dan revisi program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan. Diberikan penjelasan Renja Perangkat Daerah awal berupa pagu awal dengan rincian sumber dana, dan setelah dirubah pagu menjadi naik atau turun pagunya, disertai kondisi sumber dana dan dilengkapi analisa.

Bab IV. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran atau hal penting yang perlu mendapat perhatian penting dalam Perubahan Renja Tahun 2021.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan sampai dengan Triwulan II. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam pelaksanaan diperlukan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1.

**TABEL 2.1**  
**LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PERIODE PELAKSANAAN : 2021**  
**TRIWULAN II**

(\* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket		
				I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8		10=11/6*100		11				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.305.386		847.189		1.481.593		0		0		2.328.783		31,88
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	83 Indeks		85,62		0		0		0		85,62		103,16	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		718		0		0		0		718		36
		Jumlah dokumen perencanaan OPD, dokumen evaluasi capaian kinerja OPD, dokumen pelaporan kinerja OPD	3 dokumen		3		0		0		0		3		100	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			300		200		0		0		0		200		66,67
		Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8 dokumen		4		0		0		0		4		50	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.700		518		0		0		0		518		30,47
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen		3		0		0		0		3		100	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.942.717		714.350		686.053		0		0		1.400.402		36
		Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi keuangan, dokumen pelaporan keuangan	29 dokumen		8		4		0		0		12		41,38	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.812.717		713.782		636.771		0		0		1.350.553		35,42

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket	
				I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22 Orang		27		0		0	0	27		122,73		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			120.300		0		48.120	0	0		48.120		40	
		Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan		3		3		0	0	6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.700		567		1.162	0	0		1.729		17,83	
		Jumlah pelaporan keuangan	12 Dokumen		3		3		0	0	6		50		
X.XX.01.2.03	<b><i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i></b>			6.000		0		5.874	0	0		5.874		98	
		<b><i>Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah</i></b>	<b><i>1 tahun</i></b>		0		1		0	0	1		100		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.000		0		5.874	0	0		5.874		97,9	
		Jumlah jasa jaminan milik daerah	1 Tahun		0		1		0	0	1		100		
X.XX.01.2.06	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>			244.027		30.395		26.403	0	0		56.799		23	
		<b><i>Jumlah ketersediaan barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran</i></b>	<b><i>12 bulan</i></b>		3		3		0	0	6		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.641		6.008		4.227	0	0		10.235		47,29	
		Jumlah alat tulis kantor	40 Jenis		10		10		0	0	20		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.418		7.166		1.988	0	0		9.154		36,01	
		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 Tahun		0,25		0,25		0	0	0,5		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.965		2.398		9.344	0	0		11.742		56,01	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis		2		2		0	0	4		57,14		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800		2.265		1.510	0	0		3.775		34,95	
		Jumlah bahan bacaan	8 Jenis		8		0		0	0	8		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	1 Tahun		165.203		12.558		9.335		0		0		21.893		13,25
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor	12 unit		116.519		0		92.627		0		0		92.627		79
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair	4 Unit		26.225		0		21.875		0		0		21.875		83,41
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	8 Unit		90.294		0		70.752		0		0		70.752		78,36
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar	7 dokumen		2.765.022		49.195		637.085		0		0		686.279		25
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlahpenyediaan jasa surat menyurat	4 Jenis		1.990		880		89		0		0		969		48,69
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun		2.760.920		48.314		636.996		0		0		685.310		24,82
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan		1.712		0		0		0		0		0		0
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400		0		0		0		0		0		0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah jasa administrasi keuangan	1 Kegiatan					0		0	0	0		0		0	
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				229.100		52.532		33.552		0	0	86.083			38	
		<i>Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara penunjang kelancaran operasional kegiatan perkantoran</i>	12 unit			3		2		0	0	5		41,67			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				199.110		46.482		27.902		0	0	74.383		37,36		
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1 Tahun		0,25		0,25		0	0	0,5		50				
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.990		6.050		5.650		0	0	11.700		39,01		
		Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9 Jenis		2		2		0	0	4		44,44				
2.16.02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				13.340.412		2.091.047		2.149.590		0	0	4.240.637		31,79		
		Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media	100 persen		0		100		0	0	100		100				
2.16.02.2.01	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				13.340.412		2.091.047		2.149.590		0	0	4.240.637		32		
		<i>Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik</i>	12 jenis		4		4		0	0	8		66,67				
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				189.200		4.493		0	0	0		4.493		2,37		
		Jumlah opini dan aspirasi publik	2 Jenis		1		1		0	0	2		100				
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				32.400		2.402		0	0	0		2.402		7,41		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket		
				I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200 Kegiatan		47		19		0	0	66		33			
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			10.864.639		1.806.985		1.958.755	0	0	3.765.740		34,66			
		Jumlah publikasi media cetak koran dan majalah, media online, media elektronik, media luar ruang dan media tradisional	5 Kegiatan		3		2		0	0	5		100			
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			82.900		585		3.868	0	0	4.453		5,37			
		Jumlah pengelolaan PPID	2 Kegiatan		1		0		0	0	1		50			
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			2.078.274		233.683		186.967	0	0	420.650		20,24			
		Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi	60 Orang		57		3		0	0	60		100			
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			93.000		42.900		0	0	0	42.900		46,13			
		Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi	5 Titik		0		0		0	0	0		0			
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			17.391.300		150.266		95.215	0	0	245.481		1,41			
		Tata kelola SPBE	2,29 Indeks		2,29		0		0	0	2,29		100			
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			16.909.980		79.794		42.539	0	0	122.332		1			
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan	209 unit		209		0		0	0	209		100			
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			16.909.980		79.794		42.539	0	0	122.332		0,72			
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung	20 Unit		8		0		0	0	8		40			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket		
				I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		jaringan fiber optik	Kerja													
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			481.320		70.472		52.676	0	0		123.149				26
		Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	2 aplikasi		1		0		0	0		1			50	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			195.837		6.381		0	0	0		6.381				3,26
		Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	9 Aplikasi		1		0		0	0		1			11,11	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			194.832		57.591		39.676	0	0		97.267				49,92
		Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8 Orang		8		0		0	0		8			100	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			90.651		6.500		13.000	0	0		19.500				21,51
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	41 Orang		0		0		0	0		0			0	
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			124.159		0		0	0	0		0			0	0
		cakupan pelayanan data statistik sektoral	100 persen		0		0		0	0		0			0	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			124.159		0		0	0	0		0			0	0
		Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1 sektor		0		0		0	0		0			0	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			124.159		0		0	0	0		0			0	0
		Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1 Sektor		0		0		0	0		0			0	
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN</b>			243.300		7.074		202.282	0	0		209.355			86,05	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10=11/6*100	11
	<b>INFORMASI</b>																
		persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	15 persen			12		0		0		0		12		80	
2.21.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				243.300		7.074		202.282		0		0		209.355		86
		<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi</i>	2 OPD			1		1		0		0		2		100	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				200.000		0		199.320		0		0		199.320		99,66
		Jumlah aplikasi yang terlindungi	50 Aplikasi			31		19		0		0		50		100	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				43.300		7.074		2.962		0		0		10.035		23,18
		Jumlah layanan keamanan informasi	2 Layanan			1		1		0		0		2		100	
<b>JUMLAH</b>					38.404.557		3.095.576		3.928.680		0		0		7.024.256		
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															66,35	18,29	
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																	
- Adanya dukungan sumber daya yang memadai dalam melaksanakan yang telah direncanakan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :																	
- Tidak ada faktor penghambat yang signifikan, hanya ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena terkait dengan petunjuk yang belum ada seperti pembinaan LKM, lomba FK metra. - Respon OPD dalam memberikan jawaban dalam pengaduan dan permohonan informasi belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	
Upayakan untuk Tri Wulan III kegiatan yang ada di Tri Wulan II dapat terlaksana sehingga target dan realisasi anggaran belanja pada Tri Wulan III dapat terpenuhi																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya																	
Perlu dilakukan perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2021 dengan tahun 2020 untuk bahan evaluasi secara menyeluruh sebagai langkah perbaikan di Tahun 2022																	



Dari Tabel 2.1 tersebut dapat diuraikan evaluasi program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

- A. Program/kegiatan yang belum dilaksanakan dan capaian kinerjanya adalah

Program Penyelenggraan statistik sektoral , kegiatan Penyelenggaraandi Ingkup Daerah Kabupaten/ Kota dengan rata-rata capaian kinerja masih 0%.

- B. Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan dan capaian kinerjanya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota, rata-rata capaian kinerja 103,16% (sangat tinggi) .
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan rata-rata capaian kinerja 100% (sangat tinggi).
3. Program Alikasi Informatika dengan rata-rata capaian kinerja 100% (sangat tinggi).
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan ata-rata capaian kinerja 80% (sangat tinggi).

## **2.2 Faktor-Faktor Penyebab Capaian Kinerja Rendah**

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD antara lain realisasi kinerja yang meliputi kinerja penyerapan keuangan dan kinerja fisik yang kurang baik antara lain :

1. Ketidaksesuaian antara realisasi capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

## **2.3 Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kinerja**

Kinerja adalah keluaran/hasil yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuran yang dapat mengambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan indikator. Indikator dapat berupa indikator keluaran (*output*), yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hal yang perlu ditindaklanjuti atas kinerja pelaksanaan kegiatan yang masih kurang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah :

1. Penyesuaian indikator kinerja pada Perubahan Renja, sehingga terjadi kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan/percepatan manajemen pelaksanaan kegiatan dan pelaporan terutama dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban kegiatan.

### **BAB III**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 urusan yaitu urusan Komunikasi dan Informatik, urusan statistik dan urusan persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah dipilih indikator untuk mengukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 yaitu (1) Meningkatnya indeks SPBE; (2) Nilai evaluasi SAKIP; (3) Indeks Keterbukaan Informasi Publik; (4) Cakupan pelayanan data statistik sektoral; (5) Persentase fasilitasi persandian.

Dari dokumen Renstra tersebut kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara periodik tahunan.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan IKU cakupan sampai pada akhir Tahun 2021 adalah :

1. Mengoptimalkan pegawai dan sarana prasarana yang ada.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menunjang keberhasilan target kinerja yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan daerah di atas serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaksanakan perubahan, pergeseran alokasi anggaran kegiatan melalui Perubahan APBD Tahun 2021 dengan memperhatikan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021, urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.

Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, selanjutnya dipersandingkan alokasi anggarannya sebelum dan sesudah perubahan berdasarkan OPD dengan rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2021 dan rinciannya sebagaimana Tabel 3.1. dan Tabel 3.2

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Perubahan Anggaran  
Renja Tahun 2021

No.	Plafon Anggaran (Rp.)		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.	38.037.098.000,00	34.876.253.100,00	-3.160.84.900,00

Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja (Renja) 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
							Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana						
							Semula	Menjad i	Sebelum	Sesudah	/	Bertambah berkurang							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					38,037,098,000	34,876,253,100	-	3,160,844,900						
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	83 Indeks	83 Indeks	7,305,385,576	15,087,189,600	7,781,804,024	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2	16	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (evaluasi renja triwulan)	4 dokumen	4 dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8 dokumen	8 dokumen	300,000	300,000	300,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	<b>3,942,717,176</b>	<b>3,548,495,000</b>	<b>-394,222,176</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Pendapatan Pajak Daerah
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22 orang	22 orang	3,812,717,176.00	3,418,495,000	-394,222,176	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Pendapatan Pajak Daerah
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan	120,300,000	120,300,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaporan keuangan	12 bulan	12 bulan	9,700,000	9,700,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah yang terbayar	1 tahun	1 tahun	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa jaminan milik daerah	1 tahun	1 tahun	6,000,000	6,000,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah publikasi melalui baliho Jumlah publikasi melalui media cetak Jumlah sosialisasi ke masyarakat	24 kali 130 kali 60 kali	24 kali 130 kali 60 kali	-	<b>8,166,142,200</b>	<b>8,166,142,200</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DBH CHT
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah publikasi melalui baliho Jumlah publikasi melalui media cetak Jumlah sosialisasi ke masyarakat	24 kali 130 kali 60 kali	24 kali 130 kali 60 kali	0	8,166,142,200	8,166,142,200	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DBH CHT
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah ketersediaan barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkatoran	12 bulan	12 bulan	<b>244,027,000</b>	<b>253,911,000</b>	<b>9,884,000</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	40 jenis	40 jenis	21,641,000	21,641,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	25,418,000	35,302,000	9,884,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	7 jenis	20,965,000	20,965,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang- udangan	8 jenis	8 jenis	10,800,000	10,800,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas	1 tahun	1 tahun	165,203,000	165,203,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan sarpras aparat penunjang kelancaran administrasi kantor	12 unit	12 unit	<b>116,519,000</b>	<b>116,519,000</b>	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair	4 unit	4 unit	26,225,000	26,225,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	8 unit	8 unit	90,294,000	90,294,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP,	7 dokumen	7 dokumen	<b>2,765,022,400</b>	<b>2,765,022,400</b>	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4 jenis	4 jenis	1,990,000	1,990,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	2,760,920,400	2,760,920,400	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	1,712,000	1,712,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa adminstrasi keuangan	1 kegiatan	1 kegiatan	400,000	400,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara penunjang kelancaran operasional kegiatan	12 unit	12 unit	<b>229,100,000</b>	<b>229,100,000</b>	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak	1 tahun	1 tahun	199,110,000	199,110,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	9 jenis	29,990,000	29,990,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media	100 persen	100 persen	<b>0</b>	<b>13,340,412,424</b>	<b>8,979,383,800</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pengelolaan informasi dan publikasi	1 tahun	1 tahun	<b>13,340,412,424</b>	<b>13,340,412,424</b>	<b>8,979,383,800</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi publik	2 jenis	2 jenis	189,200,000	189,200,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200 kegiatan	200 kegiatan	32,400,000	32,400,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi media cetak koran dan majalah, media online, media elektronik, media luar luar ruang	5 kegiatan	5 kegiatan	10,864,638,800	10,864,638,800	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengelolaan PPID	2 kegiatan	2 kegiatan	82,900,000	32,900,000	-50,000,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi publik yang kompeten	60 orang	60 orang	2,078,273,624	1,137,119,000	-941,154,624	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi	5 titik	5 titik	93,000,000	43,000,000	-50,000,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Tata kelola SPBE	2,29 Indeks	2,29 Indeks	<b>0</b>	<b>17,391,300,000</b>	17,391,300,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah</b>	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik	20 unit kerja	20 unit kerja	<b>16,909,980,000</b>	<b>10,263,221,700</b>	<b>-6,646,758,300</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik	20 unit kerja	20 unit kerja	16,909,980,000	10,263,221,700	-6,646,758,300	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah layanan egovernment	10 aplikasi	10 aplikasi	<b>481,320,000</b>	<b>524,616,000</b>	<b>43,296,000</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	9 aplikasi	9 aplikasi	195,837,000	195,837,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8 orang	8 orang	194,832,000	238,128,000	43,296,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	41 orang	41 orang	90,651,000	90,651,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>20</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>0</b>	<b>124,159,000</b>	<b>74,159,000</b>		

<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	cakupan pelayanan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	<b>0</b>	<b>124,159,000</b>	<b>74,159,000</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah publikasi data statistik sektoral	20 data	20 data	<b>124,159,000</b>	<b>124,159,000</b>	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1 sektor	1 sektor	124,159,000	124,159,000	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>243,300,000</b>	<b>243,300,000</b>	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	15 persen	15 persen	<b>243,300,000</b>	<b>243,300,000</b>	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi	5 OPD	5 OPD	<b>243,300,000</b>	<b>243,300,000</b>	<b>0</b>	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi yang terlindungi	50 aplikasi	50 aplikasi	200,000,000	200,000,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi	2 layanan	2 layanan	43,300,000	43,300,000	0	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>TOTAL</b>									<b>38,404,557,000</b>	<b>35,243,712,100</b>	<b>-</b>		<b>3,160,844,900</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Melalui Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Dalam implementasi dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021, diperlukan konsistensi dan komitmen OPD dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik, saran untuk dapat membantu penyempurnaannya di masa mendatang. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini dapat di laksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta berguna untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kudus, Oktober 2021

Plt. KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sekretaris



**DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002